



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
UNIT KERJA : KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD LUTHFI
2. Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
3. NHK : 463841

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.300.000.000

1. Tanah Seluas 2662 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA ,
HASIL SENDIRI Rp. 3.150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA
SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 3.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 935.000.000

1. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
2. MOBIL, HONDA CR V Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
3. MOTOR, HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON Tahun 2013,
HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOBIL, TOYOTA HARTOP HARTOP Tahun 1984, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
5. MOBIL, TOYOTA HARTOP Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000
6. MOBIL, TOYOTA HARTOP Tahun 1966, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.033.497.662

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.268.497.662



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.268.497.662

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.